

# **SENI BUDAYA BALI DAN PERGULATAN IDENTITAS DI ERA PARIWISATA BALI**

**Oleh:**

**I Gusti Ngurah Seramasara**  
**Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar**  
*Email: aseramasara @ yahoo. com*

## **Abstrak**

Bali yang memiliki potensi seni budaya sebagai identitas yang cukup dikenal oleh dunia luar, menyebabkan Bali dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Pengembangan Bali sebagai daerah tujuan wisata telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad 20. Berdasarkan Inpres itu, Bali dijadikan pilot proyek tujuan wisata, karena potensi seni budaya Bali telah banyak di promosikan di luar negeri. Dikembangkannya Bali sebagai daerah wisata, menimbulkan pergulatan identitas budaya antara kepentingan negara dengan kepentingan daerah Bali. Negara membutuhkan devisa sedangkan pemerintah daerah ingin mempertahankan identitas budaya Bali sebagai bagian dari kegiatan keagamaan. Dengan demikian maka, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji seni pertunjukan sebagai salah satu warisan seni budaya Bali, ditengah-tengah pergulatan identitas itu. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana perkembangan seni pertunjukan tradisional Bali dalam pergulatan itu? dan, bagaimana pemerintah daerah Bali mempertahankan identitas seni budaya?. Untuk mengkaji permasalahan di atas digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teori hegemoni. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa seni pertunjukan tradisional Bali mengalami sekularisasi, dan konsep pariwisata budaya mengalami perubahan menjadi industri wisata.

*Key word: Seni Budaya Bali, Pergulatan identitas, dan Pariwisata*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah etnis yang hidup diwilayah Nusantara, masyarakat Bali mempunyai kekayaan seni budaya yang khas dan telah menjadikan Bali sebagai Pulau yang cukup dikenal oleh di mata dunia. Banyak pencitraan-pencitraan yang dilakukan oleh orang asing yang datang ke Bali sejak jaman kolonial, seperti mempromosikan Bali sebagai: *Islan of God*, *Islan of Paradise* dan *Pulau seribu pura*. Dengan pecitraan itu daya tarik wisatawan manca Negara untuk datang ke Bali sangat kuat sehingga Bali berkembang menjadi daerah tujuan wisata yang sangat terkenal tidak hanya di dalam negeri tetapi sampai ke manca negara. Keterkaitan seni budaya Bali secara holistik antara seni, adat istiadat, agama dan upacara telah memberikan gaya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Bali. Oleh karena itu maka, Bali ditetapkan secara resmi menjadi daerah kunjungan wisata oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Inpres No 9 tahun 1969 (Yoeti, 1985:56). Masyarakat dan pemerintah daerah Bali sangat menyadari bahwa daerah wisata akan menjadi tempat pertemuan berbagai bentuk budaya yang di bawa oleh wisatawan. Kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah Bali telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, intelektual pemerintah bahwa seni budaya Bali akan di dilibas oleh budaya global yang di bawa langsung oleh wisatawan yang datang ke Bali. Masyarakat dan Pemerintah daerah Bali, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak memiliki kekuatan untuk menolak Intruksi Presiden tersebut, tetapi tetap tetap berusaha untuk menyelamatkan seni budaya Bali dari pengaruh-pengaruh negatif budaya luar.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji gagasan-gagasan intelektual, seniman, budayawan, pemerintah daerah dan, masyarakat Bali dalam mengantisipasi kekhawatiran akan terjadinya pengaruh negatif pariwisata terhadap seni budaya dan masyarakat. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut maka, Bali mulai menerapkan gagasan-gagasan untuk menguatkan identitas seni budaya Bali dari ancaman budaya luar yang di bawa oleh wisatawan. Perlu dijelaskan disini bahwa penguatan identitas seni budaya Bali, telah dilakukan oleh pemerintah kolonial sejak tahun 1941 dengan mendirikan *Hollandsche Inlandche School* (HIS) di bawah yayasan Sila Darma yang disebut dengan *Balisering* (Fliehaar, 1941).

Berkembangnya pariwisata di Bali juga dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kehidupan seni budaya Bali, maka sangat dibutuhkan konsep budaya yang dapat melindungi seni budaya Bali. Tulisan ini difokuskan pada permasalahan yang terkait dengan keberadaan seni pertunjukan di tengah-tengah perkembangan pariwisata yang menimbulkan pergulatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keinginan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan kiat-kiat ekonomi. Satunya kiat ekonomi bagi daerah Bali adalah mengembangkan pariwisata. Pemerintah daerah Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Ida Bagus Mantra sangat khawatir bahwa pariwisata akan berdampak pada tergilasnya budaya Bali dan Bali akan kehilangan jati diri atau identitas. Dengan demikian permasalahan dalam tulisan ini akan difokuskan pada, bagaimana perkembangan seni pertunjukan tradisional Bali dalam pergulatan itu antara pusat dan daerah? dan, bagaimana pemerintah daerah Bali mempertahankan seni pertunjukan tradisional sebagai identitas budaya?

Untuk mengantisipasi kemungkinan pariwisata yang dikembangkan merongrong seni budaya Bali yang memiliki kekhasan sendiri serta sangat diminati oleh pihak asing, maka Pemerintah daerah bekerjasama dengan para intelektual, budayawan dan seniman untuk merumuskan sebuah konsep, sebagai landasan untuk memperkuat seni budaya Bali agar tidak mudah digilas oleh perkembangan pariwisata yang dikhawatirkan menggandeng kepentingan-kepentingan kapitalis. Hasil seminar *seni sakral dan provan* yang diadakan pada tahun 1972 yang melahirkan konsep seni *wali*, *bebali* dan *balih-balihan*, serta kebijakan pemerintah daerah Bali yang mengembangkan konsep *pariwisata budaya* dapat dianggap sebagai landasan ideal untuk melindungi atau membentengi seni budaya Bali dari pengaruh negatif budaya luar sebagai dampak pariwisata.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji fenomena seni budaya Bali adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah yang berpegang pada analisis heuristik. Prosedur penelitian kualitatif mulai dari mengumpulkan data, analisis data, kemudian menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya menjadi sebuah tulisan ilmiah (Moleong, 2011). Pendekatan sejarah dalam hal ini adalah menguji sumber data, baik sumber tertulis maupun sumber informasi dengan metode kritik sumber (Gottschalk, 1986:35). Pendekatan kwalitatif adalah sebuah diskripsi data yang sangat luas dengan landasan yang kokoh, memuat penjelasan-penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup penelitian pada suatu objek penelitian.

Objek penelitian dalam hal ini adalah seni pertunjukan tradisinal Bali yang telah dipahami mengandung nilai spiritual (sacral), dan penuh dengan nilai pengabdian dan kebersamaan sebagai salah bentuk ikatan solidaritas. krangka pemikiran yang digunakan dalam tulisan ini adalah krangka berpikir sejarah, bahwa Bali dikembangkan sebagai daerah

wisata telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Salah satu metode penelitian kualitatif telah menetapkan cara untuk mengumpulkan data adalah melalui observasi. Hasil observasi terhadap seni pertunjukan telah menemukan bahwa, tari sanghyang sebagai salah satu seni sacral telah dikemas menjadi tari kecak yang khusus disajikan untuk wisatawan.

Sebagai alat analisis untuk mengkaji permasalahan seni budaya Bali di tengah-tengah maraknya perkembangan pariwisata digunakan teori hegemoni, konsep sekularisasi, dan konsep pariwisata budaya. Teori hegemoni, merupakan sebuah teori yang menekankan adanya interpersi kekuasaan melalui cara-cara berbudaya untuk memaksakan kepentingan-kepentingan penguasa. Konsep sekularisasi adalah, berkembangnya seni pertunjukan tradisional menjadi seni wisata, dan konsep pariwisata budaya adalah pengembangan pariwisata Bali berbasis budaya. Kondisi riil yang ada di Bali, telah terjadi pergulatan antara kepentingan kekuasaan dengan konsep pariwisata budaya yang mengarah pada pariwisata industri.

## PEMBAHASAN

Keperhatian terhadap identitas Bali telah banyak diungkap dalam beberapa tulisan seperti oleh Jean Coteau dan Usadi Wiryatnaya dalam bukunya, *Bali di Persimpangan Jalan Sebuah Bunga Rampai*. Denpasar: Nusa Data Indo Budaya, 1995; Henk Schulte Nordholt, dalam bukunya, *Bali Benteng Terbuka 1995-2005 Otonomi Daerah, Demokrasi Elektoral dan identitas-Identitas Defensif*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2007. Keperhatiannya itu memberikan gambaran bahwa Bali dengan identitasnya yang khas, seperti seni budaya, agama, adat istiadat dan tradisi telah tercabik-cabik oleh sistem pemerintahan dengan desentralisasi dengan otonomi daerah telah berdampak pada dinamika konflik ditingkat lokal. Perkembangan pariwisata juga telah memberikan gambaran bahwa identitas Bali yang dikuatkan dengan seni budaya telah kehilangan orisinalitas, autentisitas dan unisitas (keutuhan) sebagai dampak dari pengembangan pariwisata yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan kapitalis.

Akan sangat penting untuk mengkaji kepentingan kolonial yang terdapat dibalik peristiwa berkembangnya *Balisering*. Bagaimanapun pemerintah kolonial Belanda tetap ingin menguatkan kekuasaannya serta mengeksploitasi Bali untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Pariwisata yang dikembangkan di Bali berdasarkan Instruksi Presiden No 9 tahun 1969 mengisyaratkan adanya sistem jual beli yang berorientasi uang. Artinya pariwisata yang mengarah pada industri budaya. Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi intelektual, seniman dan budayawan mengenai dampak bagi seni budaya Bali yang telah dikenal merupakan identitas Bali di mata dunia luar.

Berkembangnya industri budaya sebagai konsumsi wisata telah mendorong pariwisata Bali masuk ke dalam sistem kapitalis. Sistem kapitalis dalam hal ini adalah sistem ekonomi yang memiliki aspek ganda artinya, di satu pihak memiliki *nilai guna* (use value), dan di lain pihak memiliki *nilai tukar* (exchange value) (Giddens, 2009 : 57). Fenomena kesenian Bali telah berkembang menjadi industri budaya yang memiliki nilai guna dan juga diperjual belikan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Bali. Akan sangat dapat dipahami bahwa pariwisata Bali adalah bagian dari mata pencaharian orang Bali dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian maka kesenian Bali masuk kedalam arena *produksi cultural*. Arena produksi cultural dibedakan menjadi dua sub arena, yaitu arena produksi terbatas dan arena produksi skala besar (Bourdeau, 2010: xxxiii).

Seni budaya Bali merupakan identitas yang menyebabkan Bali cukup di kenal oleh dunia luar, karena itu pemerintah dan masyarakat Bali berkepentingan untuk melindungi dan

melestarikan seni budaya Bali supaya tetap utuh dan tidak dicemari oleh pengaruh budaya luar. Identitas akan merujuk pada gambaran atau citra suatu Bangsa (Tilaar, 2007:35). Identitas orang Bali yang telah terbentuk sebagai sebuah citra yang dipahami oleh orang luar terhadap Bali, disamping keramah tamahannya adalah seni budaya. Sangat dapat disadari bahwa perkembangan pariwisata Bali akan menyebabkan Bali menjadi ruang pergulatan berbagai macam jenis dan bentuk budaya. Salah satu cara untuk mempertahankan seni budaya Bali bagi pemerintah kolonial Belanda adalah mendirikan sekolah *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) Sila Darma di Klungkung pada tahun 1941 dengan memasukkan seni budaya Bali dalam kurikulum pendidikan yang dikenal dengan *Balisering*. Konsep *Balisering* dalam dunia pendidikan yang digagas oleh pemerintah kolonial bisa dipahami sebagai usaha untuk memperkuat identitas seni budaya Bali. Oleh karena *Balisering* merupakan gagasan pemerintah kolonial *Balisering* dapat dianggap memiliki motivasi politik tersembunyi untuk membendung meluasnya *faham nasionalisme* di Bali.

Nampaknya di Balik berdirinya *Balisering* ada *hegemoni kolonial* yang ingin tetap menguasai Bali agar tidak bersatu atau menjadi bagian dari Jawa bahkan Bali harus tetapi menjadi wilayah kekuasaan kolonial Belanda dan menempatkan Bali sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Keinginan ini sangat jelas dapat dipahami bahwa pemerintah kolonial Belanda memberikan julukan pada Bali sebagai, *Jong Hollands* artinya adalah, *Belanda Muda* (Agung,1989:8). Hegemoni kolonial dalam hal ini merupakan konsep partikular yang digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial atau politik tertentu dengan mengadakan relasi antara budaya kolonial yang dianggap budaya elite dengan budaya masyarakat Bali yang dianggap sebagai budaya massa atau budaya populer.

Budaya Bali kemudian dijadikan budaya populer sejak tahun 1930, yang secara sederhana budaya massa adalah budaya populer yang dihasilkan melalui teknik-teknik industri produksi massal dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan kepada khalayak konsumen massa (Strinati, 2010:36). Hal ini telah dilakukan sejak tahun 1930 dengan dikemasnya *koor laki-laki* pada tari Sang Hyang menjadi seni pertunjukan Kecak oleh Walter Spies dan Baryl de Zoete bersama dengan seke kesenian di Bedulu, Gianyar, Bali (Bandem, 1983: 42). Kecak kemudian menjadi seni komersial yang dapat mendatangkan uang, dengan demikian maka Kecak diproduksi secara Massal dan memiliki standar tersendiri.

Hegemoni pada dasarnya adalah upaya untuk menggiring agar orang menilai dan menerima fenomena sosial dalam kerangka yang ditentukan oleh penguasa dengan cara mempengaruhi *struktur kognitif* masyarakat (*ideasional*). Upaya itu dilakukan melalui ideologi tertentu yang dianggap benar secara moral oleh masyarakat, sehingga dominasi ide pemegang kuasa tidak dipertanyakan lagi (Burke, 2011:128; Hasan, 2011: 26). Relasi antara budaya penguasa dengan gagasan-gagasan intelektual pada masa kolonial dilakukan dengan mendirikan *Balisering* serta mendirikan *Kertya Liffrink van der Tuuk* (yang sekarang disebut dengan Gedung Kirtya). Kondisi ini dapat dianggap sebagai relasi antara budaya dominasi dengan budaya subordinat dan relasi ini akan dapat dipahami sebagai sebuah *kontrol sosial* atau *hegemoni budaya* (Burke, 2011: 126). Keberhasilan pemegang kuasa menyebarkan pengaruh hegemoninya karena didukung oleh organisasi infrastruktur terkait yang di dalamnya terjadi kepatuhan para intelektual karena faktor kultural dan politis (Kumbara, 2010: 10).

Konsep hegemoni budaya yang ditawarkan oleh Gramsci dalam hal ini adalah penguasa memerintah tidak dengan kekerasan semata-mata tetapi dengan *persuasi* dan dalam *persuasi* ini ada persekongkolan dengan beberapa orang yang dianggap berpengaruh dalam

bidang *seni budaya Bali* yang di dalamnya termasuk juga agamawan dan seniman. Untuk menganalisis adanya persengkongkolan ini Pierre Bourdeau menawarkan konsep kekerasan *simbolis* dan *negosiasi*. Konsep itu merujuk pada proses yang memaksa kelompok yang dikuasai agar mengakui kesahian budaya kelas penguasa (Burke, 2011:129). Budaya kelas penguasa pada waktu itu adalah budaya kapitalis dan komersialisasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dalam bentuk uang. Budaya kapitalis adalah identitas budaya penjajah yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari tanah jajahannya. Salah satu sistem yang harus dikembangkan di Bali adalah menjadikan Bali sebagai daerah tujuan wisata. Ideologi kolonial dalam hal ini adalah berkaitan dengan penyebaran gagasan dan penciptaan gagasan yang merupakan bangunan super sosial yang memberikan pembenaran terhadap kepentingan kelas dominan (Giddens, 2007:52). Menurut pendapat saya, berdasarkan ideologi itulah kolonialisme Belanda mendorong pengembangan pariwisata pada awal abad ke-20.

Ketertarikan pemerintah kolonial Belanda pada seni budaya Bali, menyebabkan Bali di promosikan sebagai daerah wisata yang cukup bagus yang dilakukan oleh *Vereniging Toristen Verkeer* (VTV) sejak tahun 1910. Promosi dilakukan dengan cara menerbitkan guide book mengenai objek wisata yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Lombok, Sumatra Utara, Simatra Barat, Banten, Toraja yang semuanya dicetak dengan menggunakan bahasa Inggris (Yoeti, 1985:31). Berdasarkan promosi itu maka *travel agent* Belanda di Batavia yang bernama *Lissonne Lindeman* (LisLind) mulai bergerak untuk membawa wisatawan ke Bali dengan menggunakan *Koninklijk Paketvaart Maatschappij* (KPM). Sejak tahun 1930,-an banyak berdatangan wisatawan, peneliti dan seniman ke Bali. Untuk menampung wisatawan yang datan maka mulai dibangun beberapa Hotel di antara Hotel Sanur Beach dan Kuta Beach, kemudian Bali Hotel.

Sejak Indonesia Merdeka kepariwisataan juga di kembangkan dengan mendirikan NV Honet yang merupakan satu-satunya perusahaan bangsa Indonesia yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. Kemudian tahun 1953 didirikan SERGAHTI (*Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia*) dan tahun 1955 didirikan PT. NATOUR (*Hotel and Tourism Corp*). Kepariwisataan pada saat ini tidak berkembang dengan baik karena iklim politik dalam negeri kurang stabil karena munculnya berbagai gerakan sparatis, landasan negara belum kuat bentuk negara masih diperdebatkan, dan sistem pemerintahan belum stabil. Kepariwisataan mendapatkan angin segar sejak keluarnya Instruksi Presiden No. 9 tahun 1969 yang pada pasal 2 Instruksi tersebut ngeisyaratkan bahwa tujuan pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan devisa negara.

Dalam Instruksi ini telah tersirat kepentingan negara untuk mendapatkan devisa yang artinya potensi kepariwisataan diarahkan untuk mendapatkan uang, sehingga berbagai produk budaya termasuk kesenian juga diarahkan agar dapat diperjual belikan untuk devisa negara dengan alasan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini kembali menggoncang pemikiran masyarakat terutama masyarakat Bali yang memiliki potensi seni budaya yang bernilai sacral. Muncul pemikiran bahwa pariwisata tidak akan bisa dielakan lagi karena pengembangan pariwisata merupakan kepentingan kekuasaan pusat, tetapi bagaimana memagari seni budaya Bali yang bernilai sakral agar tidak digilas oleh pariwisata yang mempunyai kepentingan ekonomi dibalik keinginan untuk menguatkan identitas dan citra Bali di mata dunia melalui seni budaya. Untuk tujuan ini maka di butuhkan peranan intelektual organik untuk memberikan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dapat digunakan untuk memperkuat atau menjaga kepentingan Bali. Dalam hal ini intelektual dikaitkan dengan suatu struktur dan fungsi sosial tertentu. Menurut SeymourMartin Lipset, intelektual adalah mereka yang menciptakan, menyebarkan dan menjalankan kebudayaan (Mutahir, 2011: 3).

Dalam hal ini masyarakat Bali melihat peran dan posisi intelektual dalam rangka melestarikan, melindungi dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang dianggap memiliki tatanan sosial yang bisa menyebabkan Bali menjadi lebih baik. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perubahan akan terjadi karena kebudayaan sebuah konstruksi, tetapi perubahan yang diharapkan oleh masyarakat tidak membawa nilai-nilai budaya Bali keambang kehancuran akibat desakan budaya luar. Untuk kepentingan penciptaan gagasan, penyebar luasan gagasan maka kerap kali intelektual dijadikan rujukanserta menjalankan roda kebudayaan khususnya kebudayaan Bali yang memiliki kekhasan sendiri, maka intelektual sering kali dijadikan rujukan (Eyerman, 1996: 1-2). Dalam masyarakat Bali intelektual dianggap sebagai orang yang mempunyai kemampuan lebih luas, sehingga intelektual dijadikan tumpuan harapan dalam memperjuangkan kehidupan mereka, baik mengenai masalah sosial, maupun masalah seni budaya. Intelektual dianggap mampu menegosiasi kekuasaan, karena intelektual merupakan kelompok yang diperhungkan oleh penguasa sebagai pemikir kritis dalam memikirkan Bali.

Dengan mencermati pandangan Gramsci tentang intelektual maka tidak semua intelektual mempunyai fungsi intelektual dalam masyarakat, karena itu Gramsci membedakan tipe intelektual yaitu : 1) Intelektual Tradisioanl adalah intelektual yang menyebarkan ide dan menjadi mediator antara rakyat dengan kelas atasannya, 2) Intelektual Organik adalah intelektual yang dengan penelitian dan studinya berusaha memberikan refleksi atas keadaan namun terbatas pada kepentingan kelompoknya sendiri, 3) Intelektual kritis adalah intelektual yang mampu melepaskan diri dari hegemoni penguasa atau elit kuasa yang sedang memerintah,4)Intelektual Universal adalah intelektual yang berusaha untuk memperjuangkan proses peradaban dan struktur budaya yang memperjuangkan kemanusiaan dan humanisme (Mutahir, 2011 : 5-6).

Sebagai wahana penuangan gagasan dari hasil penelitian dan studinya maka intelektual organik berusaha memberikan refleksi atas keadaan seni budaya Bali yang akan dihadapkan dengan pariwisata. Sebagai refleksi pemikiran intelektual organik yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Bali, maka pada tahun 1972 diadakan seminar *seni sacral dan provan*, untuk mengklasifikasi seni yang mana dianggap sacral dan yang mana dapat dianggap provan. Hasil seminar inilah yang kemudian dijadikan benteng untuk memagari seni budaya Bali, dengan klasifikasi seni yang disebut dengan seni *Wali, Bebali dan Balih-Balihan*. Pada tahun 1978 klasifikasi seni itu diperkuat dengan kebijakan pemerintah daerah Bali di bawah Gubernur Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dengan konsep pariwisata budaya.

Kebijakan itu dikeluarkan dengan tujuan agar seni budaya Bali tetap bisa dilindungi walupun tidak mungkin menghindar dari perkembangan pariwisata, karena kebijakan untuk mengembangkan pariwisata Bali merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sasaran kebijakan pusat ini adalah mengembangkan pariwisata untuk mendapat devisa negara besar, sehingga sistem ekonomi akan menjadi acuan utama dalam proses pengembangan pariwisata. Setiap berbicara ekonomi maka asumsi yang melatar belakangi pemikiran kita adalah terjadi proses jual beli dan terbukanya pasar bagi kebutuhan wisatawan. Inpres No 9 tahun 1969 mengindikasikan adanya perubahan sistem pengembangan pariwisata dari yang berbasis *budaya* menjadi berbasis *industri*, sehingga yang berkembang adalah *industri pariwisata*. Dalam pengamatan saya saat ini apa yang didengung-dengungkan sebagai *pariwisata budaya*, dalam kenyataannya terjadi *industri budaya*.

Peranan aktor dalam struktur pariwisata di Bali menjadi sangat penting untuk diperhatikan, untuk itu Anthony Giddens menawarkan konsep yang disebut dengan *Strukturasi* (Burke, 2011: 168). Teori Strukturasi Giddens, memusatkan perhatiannya pada

praktik sosial yang berulang yang pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen atau aktor dengan struktur. Untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen dengan struktur dapat dilihat melalui tindakan manusia. Seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling jalin menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia (Ritzer, Douglas J Godman, 2004: 507-508).

Klasifikasi seni sacral dan profan yang tertuang dalam konsep Wali, Bebal dan Balih-Balihan dimainkan oleh tindakan *aktor aktor pariwisata*, sehingga *seni wali dan balih-balihan* menjadi konsep yang sangat kabur. Hal ini menunjukkan bahwa seni pertunjukan sebagai arena produksi cultural mengalami pergulatan identitas antara *arena produksi terbatas* yang sering dianggap sebagai seni tinggi, serius, ritual, atau seni klasik yang bersifat simbolis, prestise, dan selebritis artistik, pada prinsipnya menolak determinisme ekonomi dan politik dengan *arena produksi skala besar* yang berorientasi pasar dan produksi massal (Boerdeau, 2010: xxxiii).

Menurut Bourdeau, arena produksi terbatas adalah produksi seni untuk produsen, dan motif untuk memperoleh laba ekonomi disangkal minimal oleh senimannya sendiri. Hierarki otoritas didasarkan atas beraneka bentuk laba simbolis, misalnya ketika orang melihat dirinya sebagai sosok yang tak mengincar laba (Boerdeau, 2010: xxxiv). Kondisi ini sejak munculnya pariwisata telah bergerak menjadi arena produksi budaya skala besar, yaitu arena produksi yang mencakup budaya massa atau budaya populer yang diproduksi secara massal dan dipertahankan oleh industri budaya yang berskala besar dan kompleks, prinsip hierarkisnya yang dominan melibatkan modal ekonomi atau *the bottom line* (laba finansial) (Boerdeau, 2010: xxxv). Identitas seni budaya Bali, tidak lagi bersifat esensial seperti yang diwarisi, tetapi pariwisata telah menjadi acuan identitas Bali, dengan kata lain bahwa identitas Bali adalah pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa di era reformasi esensialisme identitas kembali terbuka lebar untuk dipersoalkan, ditafsirkan kembali, ditangkap dan dimanfaatkan dalam proses sosial dan negosiasi politik dan juga dikembalikan pada ruang cultural tradisi (Ramstedt, Thufail, ed, 2011: 3).

Dengan demikian maka dalam memahami perkembangan pariwisata di Bali akan nampak adanya hegemoni kekuasaan pusat terhadap daerah dalam rangka mengembangkan pariwisata Bali untuk dapat mendatangkan devisa negara. Hegemoni dalam hal ini adalah sebuah situasi dimana blok historis faksi kelas yang berkuasa menjalankan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas subordinat melalui kombinasi antara kekuatan, dan terlebih lagi dengan konsensus (Barker, 2004: 62). Faksi kekuasaan pusat dalam hal ini dijalankan melalui kombinasi antara kekuasaan pusat dengan konsensus pada pemerintahan daerah yang artinya hegemoni dilakukan melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 1969, yang hanya melihat perkembangan pariwisata Bali dari sudut kepentingan pusat untuk mendapatkan devisa negara.

Memang pemerintah memiliki hak untuk mengintervensi dan untuk mendukung berbagai kegiatan artistik dan kebudayaan milik publik yang tidak memiliki ketertarikan pasar, tetapi juga harus melindungi apa-apa yang mulai muncul yang tidak mendapatkan sambutan khalayak luas dengan segera (Smiers, 2009: 307). Apabila dikaitkan dengan seni budaya Bali dan pariwisata maka disamping mendorong seni budaya untuk pasar wisata, tetapi juga harus melindungi seni budaya yang dapat menguatkan identitas dan kekhasan seni budaya Bali artinya posisi seni sacral dan profan menjadi jelas, atau originalitas budaya dan keutuhan budaya Bali harus tetap dilindungi.

## KESIMPULAN

Bali dikembangkan sebagai daerah wisata, sudah terjadi sejak jaman kolonial yang diulajutkan oleh pemerintah Orde baru dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Salah satu yang dapat dijadikan asset untuk mendapatkan keuntungan ekonomi adalah seni budaya khususnya seni pertunjukan tradisional Bali.

Perkembangan pariwisata dengan harapan dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi dari seni budaya Bali yang telah ditempatkan sebagai identitas, menimbulkan pergulatan antara kepentingan pusat dengan kepentingan daerah yang ingin mempertahankan seni budaya Bali sebagai identitas. Melalui seni pertunjukan tradisional dilakukan klasifikasi dan konsep pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ide Anak Agung Gde, *Bali Pada Abad XIX Perjuangan Rakyat Dan Raja-Raja Menentang Kolonialisme Belanda, 1808-1908*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Bourdeau, Pierre, *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- Bandem, I Made, *Ensklopedi Tari Bali*. Denpasar : Akademi Seni Tari Indonesia, 1983.
- Barker, Chris, *Cultural Studies, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Couteau, Jean dan Usadi Wiryatnaya, *Bali di Persimpangan Jalan Sebuah Bunga Rampai*. Denpasar: Nusa Data Indo Budaya, 1995.
- Eyerman, Ron, Cendekiawan: *Antara Budaya dan Politik Dalam Masyarakat Modern* (penterjemah Matheos Nalle). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Fliehaar, H. te, *De Aanpassing van Het Inlandch Onderwijs op Bali aan de Eigen Sfeer*. (Overdruk Uit Koloniale Studies No 2), 1941.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim dan M.ax Weber*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2007.
- Gottschalk, Louis, *Megerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Hasil-Hasil Seminar, *Seni Sakral dan Provan Bidang Tari, Tanggal 24-25 Maret 1971*. Denpasar: Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Bali, 1971.
- Hasan, Sandi Swardi, *Pengantar Cultural Studies, Sejarah, Pendekatan Konseptual dan Isu Menuju Studi Budaya Kapitalisme Lanjut*. Jakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Kumbara, A A Ngurah Anom, *Orasi Ilmiah “Konstruksi Wacana Ajeg Bali Dalam Relasi Kuasa: Antara Ideologi dan Utopia*. Denpasar: Universitas Udayana Bukit Jimbaran, 2010.
- Mutahir, Arizal, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdeau Sebuah Gerakan Melawan Dominasi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2011.

- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nordhoff, Henk Schulte, *Bali Benteng Terbuka 1995-2005 Otonomi Daerah, Demokrasi Elektoral, dan Identitas-Identitas Defensif*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2010.
- Ramstedt, Martin dan Fadjar Ibnu Thufail (ed), *Kegalauan Identitas, Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011.
- Ritzer, George-Doglas J Godman, *Teori Sosiologi Modern Edisi ke Enam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Santoso, Listyono, dkk, *Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri*. Jakarta: Ar Ruzz Media, 2010.
- Smiers, Joost, *Arts Under Pressure, Memperjuangkan Keaneka Ragaman Budaya di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press, 2009.
- Strinati, Diminic, *Populer Culture, Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2010.
- Tilaar, H.A.R, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, Tinjauan dan Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Yoeti, Oka A, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1985

#### **UCAPAN TERIMA KASIH.**

Tulisan ini merupakan bagian dari tugas-tugas saya sebagai karyasiswa S3 Kajian budaya dalam menempuh kuliah-kuliah terutama dalam mata kuliah Kapita Selekt Politik Indonesia. Dari mata kuliah ini saya mendapatkan pembelajaran tentang metode analisis serta bagaimana menggunakannya. Meskipun masih jauh dari sempurna tetapi sebagai proses pengenalan dan pemahaman pada teori saya mencoba untuk menggunakannya pada tulisan ini. Akhirnya ijinlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi, kepada Bapak Ketua Program Studi S3 Kajian Budaya, Pasca Sarjana Universitas Udayana Prof.Dr. Anak Agung Bagus Wirawan, SU, dan Sekretaris Program Studi S3 Kajian Budaya, Dr. I Putu Sukarja. M.Siyang banyak memberikan bimbingan dan arahan untuk mengikuti proses pendidikan di S3 Kajian Budaya Universitas Udayana.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. I Gde Mudana. M.Si sebagai salah seorang pengampu mata kuliah Kapita Selekt Politik Indonesia yang telah menugaskan dan mendorong saya untuk mencoba menuliskan kerangka analisis terhadap sebuah fenomena. Atas dorongannya ini saya menjadi berani untuk mencoba mengkaji sebuah fenomena seni budaya yaitu “seni budaya dalam pergulatan identitas di era pariwisata di Bali”. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen yang mengajar dan juga seluruh staf administrasi S3 Kajian Budaya Universitas Udayana.

Seluruh teman-teman karya siswa S3 Kajian budaya juga kami ucapkan terima kasih atas kerja sama dalam menerima, memahami dan mendiskusikan teori-teori yang didapatkan dalam kuliah-kuliah untuk dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji problematic dalam tulisan ini.

Demikianlah perjalanan tulisan ini, sehingga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa bersyukur kepada program studi kajian budaya yang telah membuka wawasan saya mengenai fenomena kekiniaan serta kerangka teoritiknya, sehingga saya berharap dikemudian hari kami bisa menjadi manusia yang berjiwa kritis dan bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Sebagai akhir kata apabila ada ke khilapan saya, salah kata salah ucap dengan kerendahan hati saya mohon maaf.

Om Santhi Santhi Santhi Om.